



**THE IMPACT OF THE TRAVEL RESTRICTION POLICY ON THE PERCEPTIONS
OF THE RISKS OF TRANSPORTATION BUSINESS ACTORS**

By

Beni Ismarizal¹, Fitri Rahmafitria²

^{1,2}Magister Pariwisata, Universitas Pendidikan Indonesia

Jl. Dr. Setiabudi No.229, Isola, Kec. Sukasari, Kota Bandung, Jawa Barat 40154

Email: beniismarizal10@upi.edu

Abstract

This study aims to analyze the impact of the PPKM policy on the tourism transportation industry and the movement of tourists to travel. Data collection was carried out using the in-depth interview method with 9 transportation industry players and 8 tourists interviewed within two months from November to December 2022. The technique for determining informants used purposive sampling. In this study using a qualitative descriptive analysis. The results obtained from this study prove that the PPKM policy greatly impacts the tourism transportation industry and the movement of tourists. So that until now we are faced with serious problems and become extraordinary challenges for tourism transportation industry players. This policy is also considered to be difficult for tourists who want to travel. Therefore, the results of these findings can be used as reference material for stakeholders, namely the government in formulating policies in the future. So that similar incidents become material considerations in implementing a public policy.

Keyword : PPKM Policy, Tourists, Tourism Transportation

PENDAHULUAN

Sektor pariwisata terus mendapatkan perhatian dan dukungan pemerintah sebagai salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia yang berkontribusi dalam peningkatan ekonomi negara secara signifikan yang memberikan PDB sebesar 4,8 persen pada tahun 2019 (Kemenparekraf, 2020). Namun, pada tahun 2020 adanya pandemi COVID-19 telah berdampak pada sektor pariwisata di Indonesia. Dampak tersebut tentu menjadi tantangan bagi kegiatan berskala besar maupun kecil (Ibn-Mohammed et al., 2021) dan mengakibatkan banyak kerugian sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan yang dapat memperbaiki ekonomi secara nasional (Hadiwardoyo, 2020). Mengingat situasi pandemi Covid-19 mengakibatkan semakin menurunnya berbagai aspek ekonomi maupun aspek sosial yang ada di masyarakat (Napitu et al., 2020).

Secara bertahap Indonesia melonggarkan kegiatan pariwisata untuk dapat memulihkan ekonomi pada sektor pariwisata. Namun, terdapat kebijakan yang menjadi perhatian bagi peneliti untuk di kaji secara mendalam. Salah satu kebijakannya yaitu Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 (tiga), Level 2 (dua), dan Level 1 (satu) Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di wilayah Jawa dan Bali. Kebijakan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah agar menjadi petunjuk bagi para pelaku industri pariwisata dan mengurangi penyebaran Covid-19. Dari kebijakan tersebut diharapkan menjadi mekanisme yang efektif dalam menekan laju lonjakan kasus Covid-19 pada daerah tertentu. Namun dengan adanya pengaturan perjalanan selama PPKM dalam penggunaan moda transportasi sehingga dapat membatasi wisatawan yang ingin melakukan kegiatan perjalanan. Dengan mengurangi



mobilitas perjalanan antar kota maupun antar provinsi. Hal ini menjadi perhatian bagi peneliti untuk mengkaji secara mendalam dampak dari kebijakan PPKM terhadap industri transportasi pariwisata dan wisatawan.

Berbagai penelitian serupa sebenarnya telah dilakukan di beberapa negara. Penelitian yang dilakukan di negara Cina oleh Shao et al (2021) mengemukakan bahwa pemerintah perlu mencapai keseimbangan yang tepat antara pencegahan dan pengendalian epidemi dan promosi pariwisata. Kemudian di negara Indonesia oleh Lina Ayu Safitri (2021) mengenai pemberlakuan PPKM terhadap industri skala kecil dan menengah kaki lima di Sleman, Yogyakarta. Namun di Indonesia tampaknya sebagian besar mengkaji tentang kebijakan yang bersifat umum.

Sejalan dengan informasi tersebut, penelitian mengkaji mengenai kebijakan PPKM yang berdampak pada industri transportasi pariwisata sehingga membatasi pergerakan wisatawan masih belum banyak dilakukan. Penelitian semacam ini tentunya perlu dilakukan agar dapat memberikan informasi yang mendalam tentang bagaimana implementasi kebijakan PPKM terhadap industri pariwisata. Selain itu hasil temuan ini dapat menjadi dasar penelitian pengembangan kebijakan pemulihan pada sektor pariwisata. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan PPKM pada industri transportasi pariwisata dan pergerakan wisatawan untuk melakukan perjalanan.

LANDASAN TEORI

1. Kebijakan PPKM

Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM telah diterapkan mulai awal Januari 2021, masyarakat banyak yang menyambut kebijakan ini dengan positif pada awalnya, namun setelah berjalannya waktu banyak yang memberikan tanggapan negatif karena pada kenyataannya kebijakan ini sangat berdampak pada pelaku wisata. Kebijakan ini pada awalnya hanya di

terapkan di kota – kota tertentu namun seiring perkembangan waktu merambah hampir ke seluruh kota Provinsi Jawa dan Bali. Beberapa sektor pun mulaimerasakan dampak signifikan akibat pemberlakuan kebijakn PPKM ini, salah satunya sektor transportasi (Suntoro, 2022).

Situasi atau dampak yang terjadi tidak luput dikarenakan kebijakan publik yang menyangkut suatu hal atau kegiatan yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan (do or not to do) menurut Thomas R Dye dalam (Nugroho, 2003) menjelaskan bahwa kebijakan publik yang dapat dilakukan oleh pemerintah salah satunya “Whatever governments choose to do or not to do”, yaitu segala sesuatu atau apapun yang di setujui oleh pemerintah untuk dilakukan dan tidak bisa dilakukan oleh masyarakat. Hal ini biasanya dapat terjadi ketika sesuatu seperti pandemi muncul dengan tujuan membuat masyarakat membatasi pergerakan sehingga dapat mencapai suatu hal yang diinginkan oleh pemerintah dalam kasus ini yaitu penurunan penyebaran COVID-19.

Menurut (Mawar, 2021), Kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan PPKM dapat memberikan dampak yang sangat besar terhadap bidang sosial ekonomi. Pembatasan kegiatan skala besar secara otomatis menyebabkan kondisi ekonomi semakin sulit dengan terhentinya sebagian besar kegiatan ekonomi. Kebijakan PPKM juga mempengaruhi interaksi hubungan sosial. Pembatasan aktivitas dan interaksi interpersonal menjadi masalah sosial seiring dengan kondisi berdiam diri di rumah karena rasa jenuh dan bosan yang diikuti. Masalah lain adalah penyebaran jumlah penduduk miskin, yang secara signifikan meningkatkan jumlah pengemis, anak jalanan, gelandangan dan bahkan orang dengan masalah kesehatan mental.

2. Persepsi Risiko Pelaku Usaha di Kala Pandemi

Munculnya pademi COVID-19 yang melanda seluruh dunia mengakibatkan banyak pelaku usaha mengalami kelumpuhan, tak



.....

hanya itu bahkan dalam sektor pendidikan dan perekonomian pun berakibat negatif, bahkan perusahaan-perusahaan banyak yang mengurangi aktivitas produksi dan bahkan tidak sedikit yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Perekonomian mengalami shock baik secara individu, rumah tangga, perusahaan makro dan mikro bahkan perekonomian negara sekalipun (Taufik & Ayuningtyas, 2020). Hal tersebut menyebabkan para pelaku usaha dipaksa untuk memutar otak agar dapat survive dalam keadaan tersebut, salah satu cara para pelaku usaha untuk mengembalikan perekonomian dengan cara memanfaatkan sarana media sosial.

Pemasaran produk atau jasa melalui media sosial adalah langkah tepat yang harus diambil oleh para pelaku usaha (Gu, Han, & Wang, 2020). Oleh karena itu, strategi yang diterapkan oleh para pelaku usaha tersebut harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya agar produk yang dihasilkan dapat diterima oleh masyarakat dengan memberikan informasi yang jelas dan terpercaya kepada konsumen. Hal ini mendorong perusahaan UMKM untuk mengubah strategi penjualannya dengan rencana digitalisasi. Rencana digitalisasi menggunakan market place (perantara) dan media sosial sebagai teknik pemasaran. (Arianto, 2020). Selain itu, pelaku usaha digital harus bisa berkolaborasi dengan pengguna internet untuk memasarkan produk dan layanan. Oleh karena itu, program pengembangan UMKM digital dapat menjadi salah satu alternatif penyelamatan wirausaha di tengah pandemi Covid-19.

3. Dampak Pandemi Bagi Pariwisata

Musibah Pandemi Covid-19 yang terjadi berdampak buruk bagi semua sektor khususnya di sektor pariwisata (Demir et al., 2021). Dengan kejadian tersebut industri pariwisata dihadapkan pada persoalan yang berat sehingga menjadi tantangan yang luar biasa. Seperti penurunan pendapatan dan kehilangan pekerjaan di sektor tersebut serta menyusul larangan perjalanan dan perbatasan (Bakar &

Rosbi, 2020). Peneliti terdahulu oleh Deb & Nafi (2020) juga mengemukakan bahwa pandemi Covid-19 memiliki dampak yang sangat buruk pada pariwisata dan lapangan kerja, seperti maskapai penerbangan telah membatalkan penerbangan, dan hotel hampir kosong serta lembaga pendukung pariwisata menghadapi kerugian ekonomi yang besar. Namun peneliti Vaishar & Štastná (2022)) mengemukakan bahwa pandemi COVID-19 menciptakan peluang bagi pengembangan desa wisata karena pedesaan Ceko memperoleh wisatawan domestik yang menikmati alam, atraksi gastronomi dan budaya.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengeksplorasi bagaimana kebijakan PPKM berdampak pada industri transportasi pariwisata dan pergerakan wisatawan untuk melakukan perjalanan. Pendekatan terbaik yang memungkinkan penulis untuk menghasilkan gambaran rinci dan mendalam dengan menggunakan metode kualitatif (Flick, 2014). Kriteria pengambilan sampel adalah peserta harus merupakan pelaku industri transportasi bidang pariwisata dan wisatawan yang melakukan perjalanan menggunakan moda transportasi. Informan dipilih dengan metode purposive sampling yang mana peneliti dengan sengaja memilih mereka dengan keyakinan bahwa mereka mengetahui permasalahan yang sedang dikaji sehingga dapat memberikan jawaban mendalam tentang isu-isu sentral (Welch & Patton, 1992)

Pengambilan data dilaksanakan dengan metode wawancara mendalam (in-depth interviews) dengan 9 pelaku industri transportasi dan 8 wisatawan diwawancarai dalam waktu dua bulan mulai dari November hingga Desember 2022. Durasi wawancara masing-masing wisatawan antara 30 dan 60 menit kemudian menggunakan perekam audio (Jacob & Furgerson, 2015) agar mendapatkan gambaran utuh mengenai informasi dari informan dan memudahkan penulis dalam



melakukan analisis data kualitatif. Fokus utama wawancara penelitian adalah hal yang berkaitan dengan kebijakan PPKM.

Table 1. Wawancara Pelaku Industri Pariwisata

Instansi	Alamat
Raja Tour Bandung	Jl. Kuningan Raya No.2, Antapani Tengah, Kec. Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat 40211
Mawa Holiday	Jl. A. H. Nasution 103, Bako Nasution Square No. Kar 02, Karang Parung, Kec. Mandalajati, Jawa Barat 40195
Pelangi Tour & Travel	Gg. Selapendok I, Cilamir, Kec. Cibaduyut Kiri, Kota Bandung, Jawa Barat 40125
Naz Holiday	Jl. Pondsas Saat No.49, RT.02/RW.06, Cimareun Eandil, Kec. Arcamanik, Kota Bandung, Jawa Barat 40293
Freestar & Travel	Komplek GBA 1, Blok. 1 No.46, Bejingsong, Bandung Regency, West Java 40238
Intertak Tour & Travel	Jl. Ciliwangi No.18, Cilapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114
Enso Travellers Tours	Jl. Ciliwangi No.18, Cilapit, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40114
Diaz Travelindo	Jalan Siliwangi no. 31B Ruko Fleck, RT.5/RW.1, Cipagum, Kecamatan Cibadung, Kota Bandung, Jawa Barat 40131
Megamara Tours	Ruko Parahyangan Business Park Blok B. 7, The Suites @ Metro Apartment II, Soekarno Hatta No.693, Jatisari, Kec. Buitubitu, Kota Bandung, Jawa Barat 40256

Sumber: Pribadi 2022

Table 2. Wawancara Wisatawan Domestik

Kode Peserta	Umur	Alamat
EG	23	Riau
YA	34	Riau
UG	22	Jambi
GM	25	Yogyakarta
SA	23	Lombok
YB	31	Kalimantan
SH	25	Bandung
YU	27	Bandung

Sumber: Pribadi 2022

Kejenuhan data tercapai setelah 9 pelaku industri transportasi dan 8 wisatawan selaku narasumber. Pertanyaan wawancara dikembangkan berdasarkan tujuan penelitian tentang tinjauan literatur yang relevan. Mengenai pedoman etik, semua peserta mengetahui tujuan penelitian dan hak mereka untuk menarik diri dari penelitian kapan saja. Informasi pribadi para narasumber ini dijamin anonimitasnya dan tetap dirahasiakan dengan menggunakan kode dan usia mereka untuk mengidentifikasi kata-kata mereka. Semua wawancara ditranskrip secara lengkap untuk pengkodean dan analisis.

Teknik analisis yang digunakan untuk mencapai tujuan penelitian yaitu analisis deskriptif kualitatif. Keabsahan data diverifikasi dengan teknik triangulasi sumber data yaitu membandingkan hasil wawancara

dengan hasil observasi lapangan dan studi pustaka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Presepsi Risiko Wisatawan

Persepsi wisatawan tentang risiko bahaya COVID-19 dapat memicu untuk terlibat dalam perilaku pencegahan termasuk tidak melakukan perjalanan, menghindari keramaian, menjaga jarak fisik maupun sosial dan menjaga kebersihan pribadi (Yıldırım & Güler, 2020). Wisatawan yang memiliki persepsi risiko, kecemasan, dan risiko kerentanan tertular COVID-19 ditemukan secara signifikan lebih patuh terhadap pedoman PPKM yang di berlakukan oleh pemerintah. Terkait argumen tersebut di temukan penelitian di Jerman oleh Gerhold (2020) mengemukakan bahwa individu wanita lebih dominan yang khawatir akan terinfeksi di tempat-tempat yang berisiko tinggi terkena infeksi seperti transportasi dan restoran. Hal tersebut sesuai dengan temuan dari penelitian ini bahwa ketakutan wisatawan terhadap penyebaran covid-19 akan cenderung bertindak sesuai dengan peraturan PPKM yang telah di berlakukan oleh pemerintah. Namun wisatawan juga lebih mempertimbangkan untuk datang ke destinasi wisata dengan menggunakan transportasi pariwisata maupun umum tidak hanya di latar belakang oleh kecemasan saja.

Dampak Kebijakan PPKM bagi Pelaku Transportasi Pariwisata

Hasil analisis yang diperoleh melalui wawancara pelaku industri transportasi pariwisata terkait dampak kebijakan PPKM oleh pemerintah Republik Indonesia yaitu sebagian besar berpendapat bahwa kebijakan PPKM memberikan dampak yang sangat buruk bagi kelangsungan bisnis transportasi pariwisata. Aturan yang di berlakukan sangat memberatkan ataupun menyulitkan wisatawan yang ingin melakukan perjalanan sehingga berdampak signifikan bagi pelaku usaha transportasi pariwisata. Kegiatan transportasi pariwisata menjadi terhambat dengan



diberlakukannya peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia untuk menahan penyebaran Covid-19 (Napitu et al., 2020). Protokol dan regulasi yang ketat akan diterapkan pada perjalanan domestik dan internasional menggunakan transportasi darat selama masa krisis PPKM mengingat peningkatan kasus positif Covid-19 di Indonesia. Pada akhirnya berdampak kepada sektor ekonomi yakni pendapatan pelaku bisnis transportasi pariwisata yang menurun drastis yang tentunya berdampak pada kehidupan para pekerja bahkan terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pegawai agar perusahaan tetap berjalan.

Dengan diberlakukannya aturan perjalanan saat PPKM seperti pengurangan kapasitas penumpang, mewajibkan para wisatawan memiliki sertifikat vaksinasi, hasil tes antigen yang valid dan tetap menerapkan prinsip jaga jarak (Mediyastuti Sofyan et al., 2021). Tujuan di berlakukannya kebijakan PPKM tersebut sebenarnya memiliki tujuan yang menguntungkan bagi wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata melalui darat. Wisatawan dapat merasa aman berpergian menggunakan transportasi perjalanan darat dan menguntungkan bagi industri transportasi pariwisata. Namun faktanya, dengan diberlakukannya kebijakan PPKM jelas tidak menguntungkan bagi industri transportasi pariwisata karena dianggap bahwa kebijakan tersebut hanya dikeluarkan untuk meminimalisir laju pertumbuhan Covid-19. Tidak ada solusi bagi para pelaku usaha transportasi yang mengalami kerugian akibat di berlakukannya kebijakan PPKM. Karena hal tersebut, kemudian para pelaku usaha transportasi pariwisata terpaksa harus menaikkan harga tiket demi melanjutkan operasi usaha mereka.

Dampak Kebijakan PPKM bagi Wisatawan

Suatu kebijakan publik dapat dikatakan berhasil jika memberikan manfaat baik kepada masyarakat (Desrinelti et al., 2021). Dalam penelitian ini, kebijakan publik yang dimaksud

adalah kebijakan PPKM yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran kasus Covid-19. Penelitian sebelumnya oleh Syahputra, (2022) menemukan bahwa kebijakan PPKM sangat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara positif maupun negatif. Namun faktanya temuan dari penelitian ini menemukan keluhan bahwa kebijakan PPKM membawa dampak kerugian bagi pelaku usaha transportasi pariwisata. Hasil temuan ini dapat menjadi bahan acuan bagi stakeholder yaitu pemerintah dalam meremuskan kebijakan kedepannya agar kebijakan tersebut bermanfaat bagi semua kalangan.

Hasil analisis yang di peroleh dari penelitian ini, wisatawan yang menggunakan transportasi pariwisata terkait dengan dampak kebijakan PPKM oleh pemerintah Republik Indonesia. Dampak pembelakuan kebijakan PPKM tersebut membuat para wisatawan yang menggunakan moda transportasi darat merasakan kesulitan akan syarat-syarat yang diberlakukan apabila ingin melakukan perjalanan seperti membutuhkan kelengkapan dokumen perjalanan tambahan yang harus dilengkapi, sehingga banyak wisatawan yang enggan untuk melakukan perjalanan.

Wisatawan merasa kesulitan untuk melakukan perjalanan wisata dengan transportasi darat karena harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk mengetahui hasil tes Rapid Antigen. Hal ini dilakukan untuk mengetahui apakah benar setiap pengguna transportasi darat tersebut sudah melakukan vaksinasi dosis pertama hingga dosis lengkap kemudian setiap pelaku perjalanan dalam negeri dapat melakukan check-in, dan setiap pelaku perjalanan wajib melakukan tanggung jawab terhadap diri sendiri seperti selalu menggunakan masker, selalu jaga jarak dari kerumunan sampai mencuci tangan. Diberlakukannya kebijakan tersebut membuat wisatawan mengurungkan niat untuk melakukan perjalanan wisata menggunakan moda transportasi pariwisata. Padahal saat ini wisatawan ingin sekali melakukan perjalanan



wisata karena pandemi Covid-19 yang di alami membuat wisatawan jenuh berada di rumah.

PENUTUP

Berdasarkan hasil yang di peroleh dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan PPKM sangat berdampak pada industri transportasi pariwisata dan wisatawan. Sehingga sampai saat ini dihadapkan pada persoalan yang berat dan menjadi tantangan yang luar biasa bagi pelaku industri transportasi pariwisata. kebijakan tersebut juga dianggap menyulitkan wisatawan yang ingin melakukan perjalanan wisata. Oleh keran itu, hasil temuan ini dapat menjadi bahan acuan bagi stakeholder yaitu pemerintah dalam meremuskan kebijakan di masa yang akan datang. Sehingga kejadian serupa menjadi bahan pertimbangan dalam memberlakukan suatu kebijakan publik.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Arianto, B. (2020). Pengembangan UMKM digital di masa pandemi covid-19. *ATRBIS: Jurnal Administrasi Bisnis (e-Journal)*, 6(2), 233-247.
- [2] Bakar, N. A., & Rosbi, S. (2020). Effect of Coronavirus disease (COVID-19) to tourism industry. *International Journal of Advanced Engineering Research and Science*, 7(4), 189–193. <https://doi.org/10.22161/ijaers.74.23>
- [3] Deb, S. K., & Nafi, S. M. (2020). Impact of Covid-19 Pandemic on Tourism: Recovery Proposal for Future Tourism. *Geojournal of Tourism and Geosites*, 33(4), 1486–1492. <https://doi.org/10.30892/GTG.334SPLL06-597>
- [4] Demir, M., DEMİR, Ş. Ş., DALGIÇ, A., & ERGEN, F. D. (2021). Impact of COVID-19 pandemic on the tourism industry: An evaluation from the hotel managers' perspective. *Journal of Tourism Theory and Research*, 7(1), 51–68. <https://doi.org/10.24288/jtr.857610>
- [5] Desrinelti, D., Afifah, M., & Gistituati, N. (2021). Kebijakan publik: konsep pelaksanaan. *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)*, 6(1), 83. <https://doi.org/10.29210/3003906000>
- [6] Hadiwardoyo, W. (2020). Kerugian Ekonomi Nasional Akibat Pandemi Covid-19. *Baskara: Journal of Business and Entrepreneurship*, 2(2), 83–92. <https://doi.org/10.24853/baskara.2.2.83-92>
- [7] Jacob, S., & Furgerson, S. (2015). Writing Interview Protocols and Conducting Interviews: Tips for Students New to the Field of Qualitative Research. *The Qualitative Report*, 17(42), 1–10. <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2012.1718>
- [8] Lina Ayu Safitri, C. B. D. (2021). Analisa Kebijakan Pemberlakuan Ppkm Pada Masa Pandemi Covid 19 Terhadap Industri Skala. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sumber Daya*, Vol. 23(2), 97–107.
- [9] Mediyastuti Sofyan, M., Abdussalam, A., Sabila Arifin, A., Yuda Pratama, D., & Hapid, F. (2021). Efektivitas Implementasi PPKM Terhadap Publik Dalam Otoritas Pemerintah Kota Bandung. *Jurnal Identitas*, 1(2), 62–73. <https://doi.org/10.52496/identitas.v1i2.156>
- [10] Flick, U. (2014). *The SAGE Handbook of Qualitative Data Analysis*. London: SAGE Publications Ltd.
- [11] <https://dx.doi.org/10.4135/9781446282243>
- [12] Gu, J., Han, B., & Wang, J. (2020). Covid-19: Gastrointestinal Manifestations and Potential Fecal–Oral Transmission. *Journal Gastroenterology*, 158(6), 1518–1519.
- [13] Napitu, U., Corry, C., & Matondang, K. D. (2020). Sosialisasi Pembatasan Pelaksanaan Kegiatan Masyarakat (Ppkm) Mikro Di Kelurahan Bah Kapul. *Community Development Journal : Jurnal*



-
- Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 232–241.
<https://doi.org/10.31004/cdj.v2i2.1698>
- [14] Shao, Y., Hu, Z., Luo, M., Huo, T., & Zhao, Q. (2021). What is the policy focus for tourism recovery after the outbreak of COVID-19? A co-word analysis. *Current Issues in Tourism*, 24(7), 899–904.
<https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1806798>
- [15] Syahputra, M. I. (2022). *Jurnal Intervensi Sosial (JINS)*. 1(1), 1–7.
- [16] Vaishar, A., & Šťastná, M. (2022). Impact of the COVID-19 pandemic on rural tourism in Czechia Preliminary considerations. *Current Issues in Tourism*, 25(2), 187–191.
<https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1839027>
- [17] Yıldırım, M., & Güler, A. (2020). Factor analysis of the COVID-19 Perceived Risk Scale : A preliminary study Factor analysis of the COVID-19 Perceived Risk Scale : A preliminary study. *Death Studies*, 0(0), 1–8.
<https://doi.org/10.1080/07481187.2020.1784311>



HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN